



DRPM
DIREKTORAT RISET DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PANDUAN PROGRAM RISET KOLABORASI INDONESIA TAHUN 2025



**Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Tahun Anggaran 2025**



PANDUAN PROGRAM RISET KOLABORASI ITS TAHUN 2025

PENANGGUNG JAWAB

Wakil Rektor IV Bidang Penelitian, Inovasi, Kerjasama, dan Kealumnian

Agus Muhamad Hatta

TIM PENYUSUN

Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DRPM)

Fadlilatul Taufany

Mokhamad Nur Cahyadi

Nurul Jadid

Shintami Chusnul Hidayati

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Panduan Kegiatan Riset Kolaborasi Indonesia Tahun Anggaran 2025 Dana ITS dapat diselesaikan.

Program Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) telah berlangsung sejak tahun 2018 yang diinisiasi oleh 4 (empat) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), yaitu Insitut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga dan Institut Pertanian Bogor. Kolaborasi antar 4 PTNBH ini menghasilkan kegiatan penelitian yang produktif sehingga program RKI ini telah berkembang pesat dengan lahirnya program serupa yang mengajak 13 (tiga belas) Perguruan Tinggi lainnya di Indonesia. Program turunan dari RKI ini dinamakan Program Penelitian Kolaborasi Indonesia (PPKI) yang sudah berlangsung sejak 2019. Seiring dengan ditetapkan status PTNBH yang baru, saat ini seluruh anggota RKI telah berstatus PTNBH yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, program RKI ini dapat menjadi program *flagship* yang akan mengangkat kolaborasi Indonesia ke tingkat Internasional. Dengan ini, kami hadirkan panduan program Riset Kolaborasi Indonesia Tahun 2025.

Surabaya, Februari 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
1. Latar Belakang.....	1
2. Tujuan Kegiatan	5
3. Fokus Riset	5
4. Skema Riset.....	6
4.1. Peneliti pada Perguruan Tinggi Utama atau <i>Host</i>	6
4.2. Peneliti pada Perguruan Tinggi Mitra	7
4.3. Susunan Tim Peneliti ITS.....	7
4.4. Proposal	7
4.5. Dana Program.....	8
5. Mekanisme dan Rancangan.....	9
6. Keluaran	10
7. Jadwal	11
8. Penutup.....	11
Lampiran 1: Format full-proposal	12
Lampiran 2: Formulir Kesiediaan Peneliti Mitra Perguruan Tinggi	16
Lampiran 3: Daftar keywords Sustainable Development Goals (SDGs)	17

1. Latar Belakang

Dalam era yang semakin terbuka, disruptif, dan tanpa batas sekarang ini, peneliti selain dituntut untuk senantiasa menghasilkan karya secara mandiri juga dituntut untuk dapat melakukan kerjasama riset dengan peneliti lainnya baik di dalam maupun di luar negeri sehingga riset yang dilakukan dapat lebih komprehensif, dan diharapkan mampu menciptakan ekosistem budaya ilmiah unggul di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, ITS memiliki program untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di kampus dengan membuat tabel indikator dan target penelitian untuk menentukan arah dan fokus penelitian yang akan dilakukan. Dalam RENIP ITS tahun 2020, hal ini penting karena dengan menentukan arah dan fokus penelitian, peneliti dapat menghasilkan karya yang lebih bermakna dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri.

Indikator IKU Kemdikbud dan KPI ITS Emas, pada beberapa sasaran strategis ITS, khususnya di bidang penelitian dalam rentang waktu 2020 – 2025, disajikan dalam Tabel 1.1, dimana sasaran tersebut dapat dilihat dari beberapa perspektif, diantaranya:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Perspective*): Terciptanya publikasi berkualitas tinggi dan inovasi yang berkontribusi nasional;
2. Perspektif Proses Internal (*Internal Process*): Terbentuknya produk-produk riset dan pengabdian masyarakat yang berkualitas;
3. Perspektif Keuangan (*Financial Perspective*): Terbentuknya perencanaan program, yang mendukung keberlanjutan keuangan.

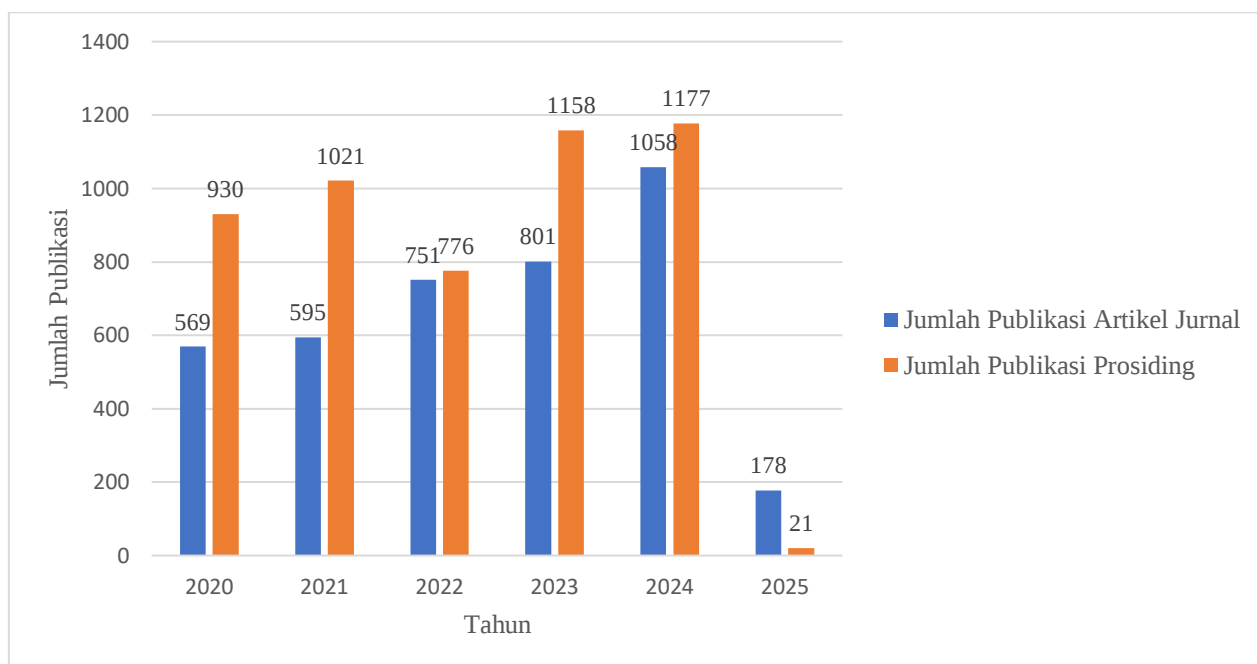
Tabel 1. 1 Indikator kinerja utama dan target tahunan pada perspektif pemangku kepentingan, proses internal, dan keuangan ITS

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	JENIS
I. Terciptanya publikasi berkualitas tinggi dan inovasi yang berkontribusi nasional								
1	Jumlah publikasi internasional (Jurnal Q1-Q4 dan seminar internasional)	1660	1760	1860	1960	2060	2160	kemdikbud
2	Rasio Jumlah Publikasi Bersama (Co-Authorship) Internasional Akumulatif / Jumlah Dosen	1,09	1,38	1,71	2	2,3	2,6	emas
3	Rasio Jumlah Sitasi dari Publikasi Internasional Akumulatif / Jumlah Dosen	45,1	50	58	68	80	94	emas
4	Rasio Total Nilai H-Index Scopus Dosen / Jumlah Dosen	2,2	3	4	4,5	5	6	emas
5	Rasio Jumlah Publikasi Internasional Terindeks Scopus Akumulatif / Jumlah Dosen	6,9	8,5	10,2	10,3	10,4	10,5	emas

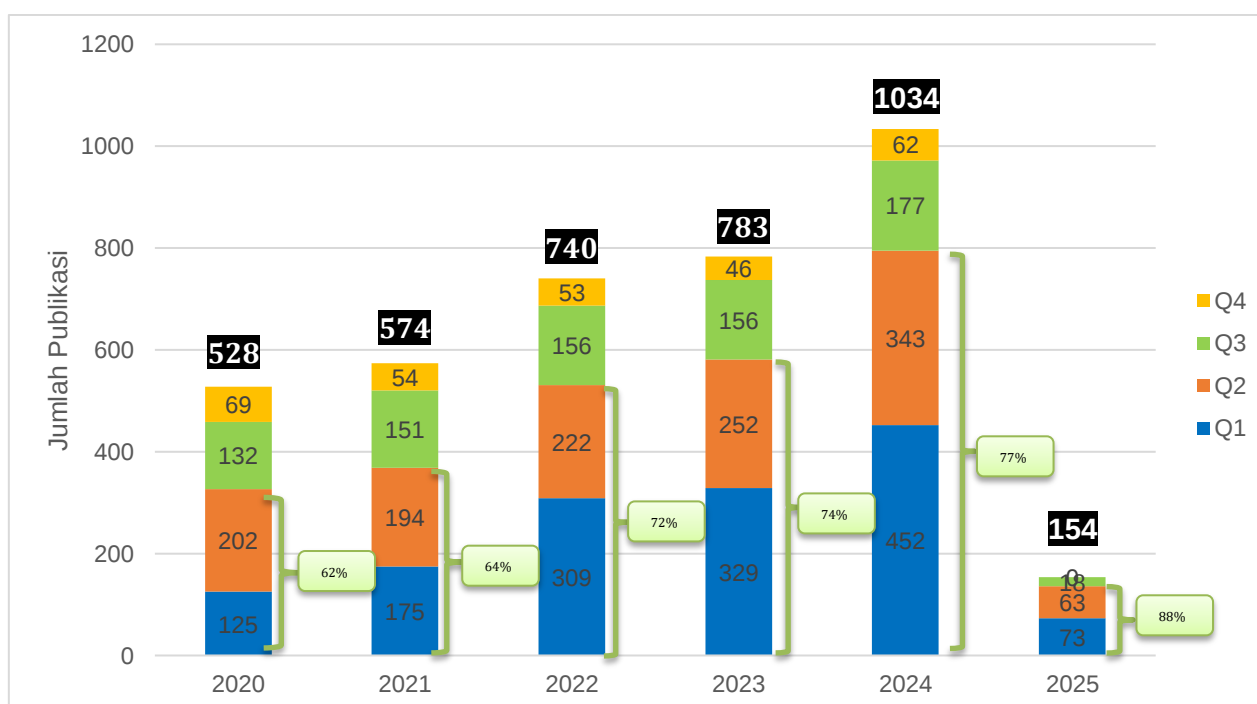
NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	JENIS
II. Terbentuknya produk-produk riset dan pengabdian masyarakat yang berkualitas								
1	Jumlah Buku saku (handbook) pedoman (guidelines), manual, buku teks (textbook), monograf, ensiklopedia, kamus dengan distribusi nasional/diterapkan di proyek/pemerintah/organisasi lain.	10	20	25	30	35	40	kemdikbud
2	Jumlah Penelitian diterapkan atau dikerjakan untuk lembaga pemerintah, perusahaan swasta, BUMN/BUMD, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral.	80	100	120	140	160	180	kemdikbud
3	Rasio Jumlah Judul Penelitian / Jumlah Dosen	0,9	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9	emas
4	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	1,15	2,62	2,63	2,71	2,88	3,06	kemdikbud
5	Jumlah karya tulis ilmiah diakui secara internasional dan karya tulis ilmiah diterapkan di masyarakat	2335	2528	2716	2905	3150	3350	kemdikbud
6	Jumlah publikasi jurnal nasional abmas	185	190	195	200	205	210	kemdikbud
7	Jumlah Publikasi dengan sitasi > 10	900	950	1000	1050	1100	1150	kemdikbud
III. Terbentuknya perencanaan program, yang mendukung keberlanjutan keuangan								
1	Rasio Jumlah Anggaran Riset / Jumlah Anggaran Total	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	emas
2	Rasio Jumlah Anggaran Riset / Jumlah Dosen (Rp. Juta)	75	77,5	80	82,5	85	87,5	emas

Perkembangan publikasi internasional bereputasi oleh dosen peneliti ITS telah berjalan dengan baik selama 5 (lima) tahun terakhir. Perkembangan ini perlu dipelihara dan ditingkatkan secara kuantitas dan kualitasnya. Pada **Gambar 1.1** terlihat bahwa tren artikel jurnal terindeks Scopus meningkat secara konsisten dari tahun 2020-2024. Secara garis besar, Pada tahun 2024, jumlah/kuantitas publikasi internasional (Jurnal Q1-Q4 dan seminar internasional) mencapai 2.235, melampaui target yang ditetapkan sebesar 2.060. Presentase kenaikan artikel jurnal tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 32,08%. Lebih lanjut pada **Gambar 1.2**, terlihat bahwa kualitas publikasi jurnal internasionalnya dalam kuartil 1 dan 2 (Q1 dan Q2) juga turut konsisten meningkat dan signifikan

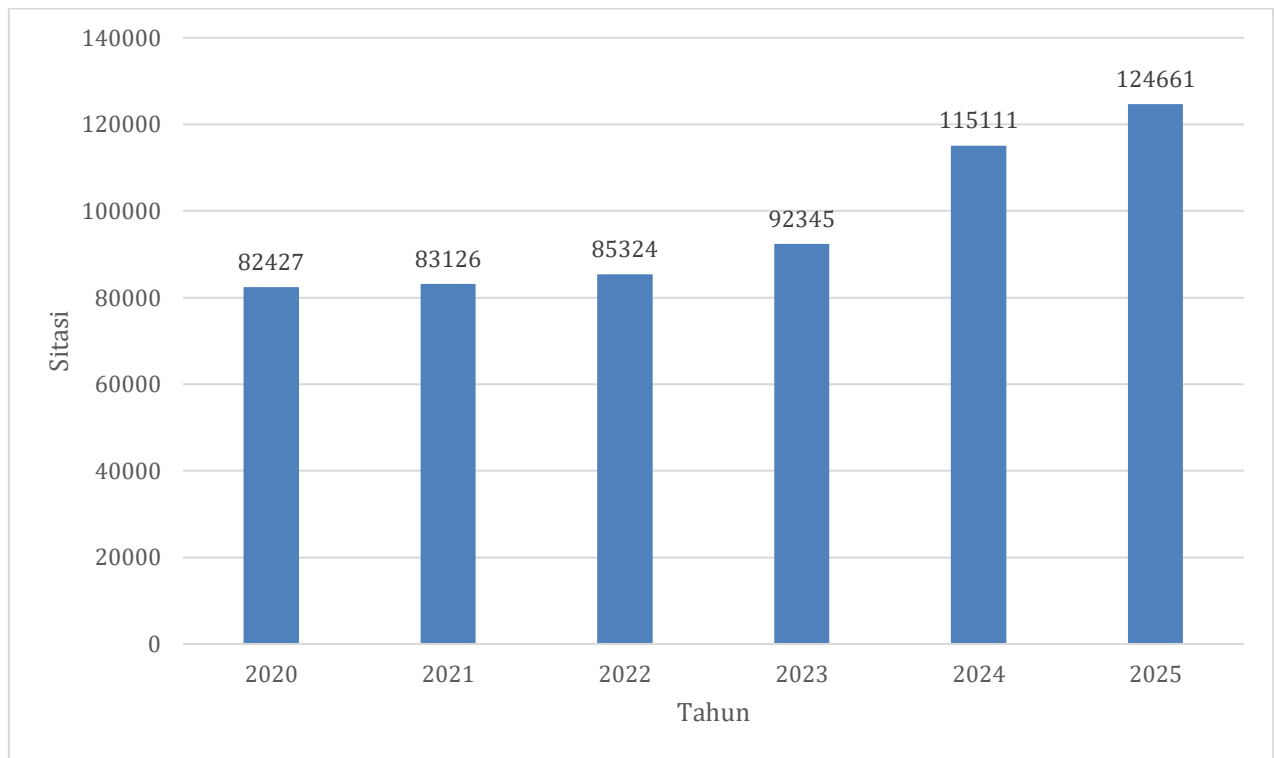
pada tiap tahunnya. Pada tahun 2024, prosentase publikasi jurnal internasional Q1 dan Q2 mencapai 77 %. Hal ini juga sejalan dengan meningkatnya akumulasi sitasi publikasi pada tiap tahunnya, seperti terlihat pada **Gambar 1.3**. Pada tahun 2024, total akumulasi sitasi publikasi sebesar 115.111 dengan produktifitasnya sebesar 102,9 .



Gambar 1. 1 Capaian Publikasi Internasional (Jurnal Q1-Q4 dan seminar internasional).
Data per Februari 2025



Gambar 1. 2 Capaian Publikasi Internasional Artikel Jurnal Q1-Q4
Data per Februari 2025



Gambar 1. 3 Capaian Jumlah Sitasi Publikasi Akumulatif dari Dosen Peneliti ITS 2019-2025
Data per Februari 2025

Kerjasama riset atau riset kolaboratif, seperti halnya program Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas riset dan pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah publikasi dan berikut sitasi dari jurnal ilmiah bereputasi Internasional yang dihasilkan. Adapun 24 Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH) yang tergabung dalam program RKI ini adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Airlangga (UNAIR), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Hasanuddin (UNHAS), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Andalas (UNAND), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Terbuka (UT), Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dan Universitas Sriwijaya (UNSRI).

2. Tujuan Kegiatan

Adapun yang menjadi tujuan program RKI diantaranya adalah:

- a) Memperluas dan memperdalam jejaring kerjasama riset antar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- b) Memperluas kerjasama riset PTNBH dengan stakeholder lain (PTN, PTS, Lembaga Riset, Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Industri) untuk mempercepat hilirisasi hasil riset;
- c) Memperkuat wawasan keilmuan yang bersifat multi/ inter/ lintas disiplin diantara para dosen/ peneliti;
- d) Mengembangkan embrio kerjasama riset yang lebih luas dengan institusi negara lain secara lebih seimbang, setara, dan kontributif untuk masyarakat Indonesia;
- e) Meningkatkan jumlah publikasi jurnal bereputasi internasional yang terindeks *Scopus* (*Elsevier*) dan berdampak;
- f) Meningkatkan peringkat perguruan tinggi berdasarkan kualifikasi *Quacquarelli Symonds* (QS) dan/atau *Times Higher education* (THE).

3. Fokus Riset

Fokus riset dapat mencakup bidang-bidang prioritas sains, teknologi dan sosial humaniora sesuai arahan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hal ini meliputi bidang penelitian di sektor pangan, energi, kemandirian kesehatan, transportasi, pertahanan dan keamanan, agro maritim, pariwisata, digital diplomasi dan sosial humaniora. Adapun hasil penelitian ini kedepannya dapat memberikan pembangunan berkelanjutan yang bertumpu kepada *digital*, *blue* dan *green economy*.

Bidang strategis yang dikembangkan harus memuat pendekatan multi/inter/lintas-disiplin dan lebih diutamakan memiliki muatan lokal Indonesia (*indigenous knowledge and resources*) serta bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah lokal yang ada di Indonesia.

4. Skema Riset

Skema program RKI yang ditawarkan oleh ITS di tahun 2025 adalah **SKEMA A** (Kolaborasi 24 PTNBH)

Skema ini adalah kelanjutan kolaborasi antara 24 PTNBH, yaitu Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Airlangga (UNAIR), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Hasanuddin (UNHAS), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Andalas (UNAND), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Terbuka (UT), Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dan Universitas Sriwijaya (UNSRI). Adapun kriteria pengusulan proposal adalah sebagai berikut:

4.1. Peneliti pada Perguruan Tinggi Utama atau *Host*

- 1) *Host* adalah peneliti di salah satu Perguruan Tinggi Badan Hukum;
- 2) *Host* sudah berkualifikasi Doktor (S3);
- 3) *Host* memiliki publikasi di jurnal bereputasi internasional dengan h-index sekurangnya 4 (empat) berdasarkan pangkalan data Scopus (<https://www.scopus.com/>) untuk kluster sains dan teknologi, atau h-index sekurangnya 3 (tiga) berdasarkan pangkalan data Scopus untuk kluster sosial humaniora;
- 4) *Host* harus memiliki peta jalan riset (*roadmap*), program riset yang sedang berjalan, fasilitas riset, serta mitra peneliti yang **bersedia** untuk melaksanakan penelitian (bukan mitra yang hanya dipinjam namanya);
- 5) *Host* harus memiliki minimal 2 (dua) mitra dari salah satu Perguruan Tinggi Badan Hukum yang berbeda;
- 6) *Host* bisa mewakili Fakultas/Sekolah atau Pusat/Pusat Studi;
- 7) **Peneliti harus telah memenuhi janji *output* Hibah RKI pada tahun sebelumnya, yaitu sebagai berikut: Minimal berstatus *submitted* untuk luaran hibah RKI tahun 2024, dan berstatus *published* untuk hibah RKI/PPKI tahun 2023 dan tahun sebelumnya.**

4.2. Peneliti pada Perguruan Tinggi Mitra

- 1) Mitra kegiatan riset adalah minimal 2 (dua) peneliti dari Perguruan Tinggi Badan Hukum yang berbeda;
- 2) Mitra sudah berkualifikasi Doktor (S3);
- 3) Mitra harus memiliki program riset yang sedang berjalan, memiliki rekam jejak riset yang jelas di tingkat nasional/internasional serta fasilitas riset yang tersedia untuk pelaksanaan riset;
- 4) **Peneliti harus telah memenuhi janji *output* Hibah RKI pada tahun sebelumnya, yaitu sebagai berikut: Minimal berstatus *submitted* untuk luaran hibah RKI tahun 2024, dan berstatus *published* untuk hibah RKI/PPKI tahun 2023 dan tahun sebelumnya.**

4.3. Susunan Tim Peneliti ITS

- 1) Pengusul adalah dosen tetap ITS, berkualifikasi Doktor (S3), masih aktif, **tidak sedang melaksanakan izin/tugas belajar** dan memiliki NIDN;
- 2) Pengusul utama/host maupun pengusul mitra yang berasal dari ITS, dapat melibatkan anggota tim peneliti internal (dosen) dengan ketentuan:
 - a. Dosen tetap ITS, masih aktif, dan tidak sedang melaksanakan izin/tugas belajar;
 - b. Melibatkan sebanyak 3-5 dosen yang berasal dari **setidaknya 2 departemen** di ITS.
- 3) Wajib melibatkan mahasiswa dengan rincian:
 - a. Dosen ITS sebagai Host PTNBH (Ketua peneliti konsorsium):
 - i. Wajib melibatkan mahasiswa baru pascasarjana ITS;
 - ii. Wajib melibatkan mahasiswa sarjana ITS.
 - b. Dosen ITS sebagai Mitra PTNBH (Anggota peneliti konsorsium):
 - i. Diharapkan (Opsional) melibatkan mahasiswa pascasarjana ITS;
 - ii. Wajib melibatkan mahasiswa sarjana ITS.

4.4. Proposal

- 1) *Full Proposal* dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, dengan mengikuti Template di **Lampiran 1**;
- 2) *Full Proposal* di-submit oleh Peneliti (*Host*) pada Perguruan Tinggi Utama, dengan melampirkan Formulir Kesiadaan Peneliti Mitra di **Lampiran 2**;

- 3) Peneliti (*Host*) mengusulkan kegiatan penelitian dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 1 hingga TKT 3. Pedoman TKT mengikuti arahan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- 4) Template *Full Proposal* Riset Kolaborasi Indonesia Tahun 2025 dalam Ms. Word dapat diunduh melalui tautan <https://its.id/kumpulanpanduan> dengan kode dokumen : TM/DRPM-ITS/PN.01.004.

4.5. Dana Program

- 1) Total anggaran hibah yang disediakan berasal dari masing-masing PTNBH;
- 2) Peneliti dari Perguruan Tinggi *Host* dapat mengajukan usulan dana Rp. 250.000.000,00 dengan rincian dana berasal dari Perguruan Tinggi *Host* sebesar maksimal Rp. 100.000.000,00 dan dari masing-masing Perguruan Tinggi Mitra sebesar maksimal Rp. 75.000.000,00;
- 3) Besar penggunaan dana mengikuti ketentuan SBM dan Panduan Keuangan Kegiatan yang berlaku;
- 4) Dana dapat dianggarkan untuk:
 - a. Bahan habis;
 - b. Alat penunjang/aset;
 - c. Pengumpulan Data;
 - d. Sewa Peralatan;
 - e. Analisa Data;
 - f. Pelaporan Luaran Wajib/Tambahan;
 - g. Perjalanan Dinas untuk tujuan Monev ke-2;
 - h. Total anggaran (poin a sampai g) adalah maksimum 100%; dan
 - i. Semua pendanaan termasuk pajak.
- 5) Dana tidak dapat digunakan untuk:
 - a. Honorarium Ketua dan Anggota Peneliti Dosen;
 - b. Pembelian/pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa;
 - c. Pembelian atau sewa tempat, meubelair, dll;
 - d. Pembelian kendaraan operasional;
 - e. Jaminan dan pinjaman kepada pihak lain; dan
 - f. Hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat.

5. Mekanisme dan Rancangan

Adapun mekanisme dan rancangan kegiatan diantaranya :

- a) Program RKI ini disosialisasikan ke seluruh Fakultas/Sekolah/Pusat/Pusat Studi di masing-masing 24 PTNBH;
- b) *Full Proposal* beserta dokumen pendukung dalam bentuk softcopy dikirim melalui *website* Sistem Informasi RKI (<https://risetkolaborasi.its.ac.id/>);
- c) Usulan proposal harus dipastikan telah dikomunikasikan kepada seluruh peneliti (peneliti host dan mitra);
- d) Usulan proposal dimungkinkan multiyear (2 tahun), dengan tetap mengusulkan proposal lanjutan. Penentuan kelanjutan tahun ke-2 berdasarkan evaluasi capaian riset tahun pertama dan evaluasi proposal lanjutan;
- e) Setiap proposal diseleksi oleh 2 (dua) *reviewers* yang ditugaskan dari perwakilan 24 PTNBH untuk dinilai kelayakannya;
- f) Seleksi meliputi aspek kelayakan kegiatan riset, rekam jejak peneliti, serta ketercapaian keluaran;
- g) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap keluaran sesuai dengan target yang dicantumkan pada proposal akan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dan dihadiri oleh peneliti;
- h) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke-1 dan ke-2 wajib dihadiri oleh peneliti utama. Namun, bagi peneliti mitra yang ingin menghadiri monitoring dan evaluasi bersama ketua peneliti dipersilakan;
- i) Pelaksanaan kegiatan penandatanganan kontrak, dan monev ke-1 dilakukan secara daring (untuk para peneliti). Sedangkan untuk monev ke-2 dilakukan secara luring;
- j) Pada RKI 2025 ini, kegiatan penandatanganan kontrak akan diselenggarakan di Universitas Terbuka (UT), sedangkan monev ke-1 akan diselenggarakan di Universitas Negeri Malang (UM), dan monev ke-2 akan diselenggarakan di Universitas Negeri Padang (UNP);
- k) Biaya perjalanan dinas untuk peneliti utama menghadiri kegiatan monitoring dan evaluasi dibebankan pada anggaran riset yang telah diterima;
- l) Jika peneliti utama berhalangan menghadiri monitoring dan evaluasi, maka peneliti mitra yang ditugaskan dapat menggantikan;
- m) Dokumen Laporan ke-1 (Laporan Kemajuan) dan Laporan ke-2 (Laporan Akhir) beserta dokumen pendukung dalam bentuk *softcopy* dikirim melalui *website* Sistem Informasi RKI (<https://risetkolaborasi.its.ac.id/>).

6. Keluaran

Adapun keluaran kegiatan program RKI diatur dengan mengikuti ketentuan berikut:

- a) Target luaran wajib yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 1. Dosen ITS sebagai *Host* PTNBH (Ketua peneliti konsorsium):
Target luaran wajib adalah publikasi minimal 1 (satu) artikel jurnal internasional Scopus-Q1, dan *co-authorship* di minimal 2 jurnal internasional Scopus-Q2 dari pihak mitra PTNBH anggota penelitian konsorsium.
 2. Dosen ITS sebagai Mitra PTNBH (Anggota peneliti konsorsium) dapat memilih:
 - i. Target luaran wajib adalah publikasi minimal 1 (satu) artikel jurnal internasional Scopus-Q2, dan *co-authorship* di 2 jurnal internasional dari minimal Scopus-Q2 pihak *Host* dan Mitra PTNBH lain; atau
 - ii. *Co-authorship* 1 (satu) artikel Jurnal Internasional Bereputasi dengan *percentile* Top 5% pada bidang ilmunya, berdasarkan CiteScore Scopus atau berdasarkan Impact Factor Web of Science edisi SCIE, SSCI, atau AHCI.
- b) Minimal 3 (tiga) publikasi jurnal internasional terindeks Scopus di atas, merupakan kontribusi dari Perguruan Tinggi *Host* dan Mitra. Penulis Pertama dan Penulis Korespondensi berasal dari Perguruan Tinggi masing-masing yang membiayai penelitian tersebut;
- c) Pada setiap publikasi diharuskan mencantumkan peneliti dari semua mitra beserta afiliasinya dan menuliskan sumber pendanaan program RKI beserta nomor kontrak penelitiannya sebagai Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*);
- d) Status kemajuan pencapaian keluaran dilampirkan dalam Laporan Kemajuan dan Akhir berupa:
 1. Bukti kirim (*Acknowledgment submission*);
 2. Bukti peringkat *quartile* jurnal (Q1-Q2) dan nilai *percentile* dari Scopus;
 3. Manuskrip yang disubmit, atau artikel yang telah accepted maupun published.
- e) Semua luaran publikasi berupa jurnal internasional, maupun prosiding atau buku wajib mencantumkan minimal 1 (satu) keywords *Sustainable Development Goals* (SDGs), seperti yang disajikan dalam **Lampiran 3**.

7. Jadwal

Tanggal-tanggal penting:

Penerimaan Proposal	:	17 Februari – 7 Maret 2025
Evaluasi Proposal	:	11 Maret – 16 Maret 2025
Penetapan Penerima Dana RKI 2025	:	20 – 22 Maret 2025
Pengumuman Hasil Evaluasi Proposal	:	25 Maret 2025
Acara Penandatanganan Kontrak RKI 2025	:	25 Maret 2025 (UT)
Pelaksanaan Kegiatan RKI 2025	:	10 April – 29 November 2025
Pemasukan Laporan Kemajuan	:	21 Agustus – 1 September 2025
Monitoring dan Evaluasi Laporan ke-1	:	3 – 4 September 2025 (UM)
Pemasukan Laporan Akhir	:	11 – 22 November 2025
Monitoring dan Evaluasi Laporan ke-2	:	27 - 28 November 2025 (UNP)

8. Penutup

Pertanyaan terkait bantuan ini dapat dilayangkan melalui e-mail atau WA sebagai berikut :

1. Kasubdit Riset - DRPM (Mokhamad Nur Cahyadi), WA : 0857-7614-2444 terkait Teknis Panduan.
2. Kasubdit Data dan Layanan Ilmiah – DRPM (Shintami Chusnul Hidayati), email: shintami@its.ac.id terkait Platfom website Sistem Informasi RKI;

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemajuan institusi.

**PROPOSAL
RISET KOLABORASI INDONESIA
SKEMA A
DANA ITS
TAHUN 2025**



JUDUL PENELITIAN

.....

Peneliti Utama : Nama/Departemen/Fakultas
Peneliti Mitra : 1. Nama/Fakultas/ Perguruan Tinggi
2. Nama/Fakultas/ Perguruan Tinggi
3. Dst.

**<<INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER>>
<<Bulan>>, 2024**

DAFTAR ISI

IDENTITAS PROPOSAL

- 1 RINGKASAN PROPOSAL
- 2 PENDAHULUAN
 - 2.1 LATAR BELAKANG
 - 2.2 TUJUAN
- 3 METODOLOGI
- 4 RENCANA PELAKSANAAN
- 5 DAFTAR PUSTAKA
- 6 INDIKATOR KEBERHASILAN (TARGET CAPAIAN)
- 7 JADWAL PELAKSANAAN
- 8 PETA JALAN
- 9 USULAN BIAYA
- 10 CV PELAKSANA

IDENTITAS PROPOSAL

1. Judul :
2. Peneliti *Host*
 - a. Nama Lengkap :
 - b. Jabatan Fungsional/Golongan :
 - c. NIP :
 - d. Departemen :
 - e. Fakultas :
 - f. Perguruan Tinggi :
 - g. Alamat Kantor/Telp/E-mail :
 - h. Alamat Rumah/Telp/HP :

3. Peneliti Mitra

No	Nama Peneliti	E-mail	Fakultas/ Sekolah/PP/P	Institusi/ Perguruan Tinggi	Bidang Keahlian

4. Skema yang diusulkan : RKI - A
5. Total Biaya yang diusulkan : Rp.
6. Target Publikasi Internasional (*Joint Publication*) :

No.	Nama Jurnal Internasional	Quartile	Jumlah Artikel
1.			
2.			

Proposal ini belum pernah didanai oleh atau diusulkan ke sumber lain.

Mengetahui,
Direktur Riset dan Pengabdian
kepada Masyarakat - ITS

Surabaya,
Peneliti Utama

Fadlilatul Taufany, S.T., Ph.D.
NIP. 198107132005011001

.....
NIP.

1. RINGKASAN PROPOSAL**2. PENDAHULUAN**

2.1. Latar belakang masalah

2.2. Tujuan

3. METODOLOGI**4. RENCANA PENELITIAN**

(a) Pelaksanaan penelitian di PT - *host*

(b) Pelaksanaan penelitian di PT - mitra (maksimum 1 halaman tiap peneliti mitra)

5. DAFTAR PUSTAKA**6. INDIKATOR KEBERHASILAN (TARGET CAPAIAN)**

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	JUMLAH	DESKRIPSI
1	Keluaran (<i>output</i>) Hasil Riset		
2	Dampak (<i>outcome</i>) Hasil Riset		
3	Pembinaan <i>peer</i>		
4	Networking internasional		

7. JADWAL PELAKSANAAN**8. PETA JALAN (ROAD MAP) RISET****9. USULAN BIAYA****10. CV PENELITI** (dilengkapi dengan *screen shoot data h-index*)

Lampiran 2: Formulir Kesiediaan Peneliti Mitra Perguruan Tinggi

FORMULIR KESEDIAAN PENELITI MITRA PERGURUAN TINGGI RISET KOLABORASI INDONESIA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa :

Nama Peneliti Mitra : _____
NIP : _____
Universitas/Institut : _____
Fakultas/Sekolah : _____
Program Studi : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya **bersedia** bermitra dalam Program Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) 2025 Skema A dengan :

Nama Peneliti Utama : _____
NIP : _____
Universitas/Institut : _____
Fakultas/Sekolah : _____
Judul Penelitian : _____

Dengan komitmen dana *in-cash* sebesar Rp. 75.000.000,00.

Demikian surat kesiediaan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui,
Ketua/Direktur LPPM/DRHPM

Kota, Tanggal
Yang menyatakan,
Peneliti Mitra

.....
NIP.

.....
NIP.

Lampiran 3: Daftar keywords Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG 1 (No poverty)	SDG 2 (Zero hunger)	SDG3 (Good health and well-being)	SDG 4 (Quality education)	SDG 5 (Gender equality)	SDG 6 (Clean water and sanitation)	SDG 7 (Affordable and clean energy)	SDG 8 (Decent work and economic growth)	SDG 9 (Industry, innovation and infrastructure)	SDG 10 (Reduced inequalities)	SDG 11 (Sustainable cities and communities)	SDG 12 (Responsible consumption and production)	SDG 13 (Climate action)	SDG 14 (Life below water)	SDG 15 (Life on land)	SDG 16 (Peace, justice and strong institutions)	SDG 17 (Partnerships for the goals)
Developing countries	Agricultural Orientation index	Access to clean water and sanitation	Access to education	Basic living standards	Accessible water	Affordable energy	Aid for trade	Access to the internet	Affordable housing	Adaptable	Capitalism	Average global temperature	Artisanal fishers	Afforestation	Abuse	Capacity building
Basic services	Agricultural productivity	Affordable medicines	Basic education	Dignity	Affordable drinking water	Alternative energy	Banking	Affordable access	Age	Adaptation	Cars	Carbon	Biodiversity	Agriculture	Accountability	Civil society partnerships
Class	Agriculture	AIDS	Basic literacy	Disadvantaged	Aquifer	Animal waste	Child labour	Affordable credit	Ageism	Affordable housing	Circular economy	Carbon dioxide	Carbon dioxide	Animals	Accountable institutions	Communication technologies
Disadvantaged	Consume	Air contamination	Basic literacy skills	Discrimination	Cities	Battery	Child soldiers	Clean technologies	Business	Air pollution	Commercial enterprises	Changing weather patterns	Coastal biodiversity	Arable land	Arbitrary detention	Debt sustainability
Economic resources	Crop diversity	Air pollution	Cultural diversity	Employment	Clean water	Carbon	Creativity and innovation	Cooperation	Children	Air quality	Consumer levels	Climate	Coastal ecosystems	Bees	Arms	Development assistance
End poverty	Crops	Alcohol abuse	Disability	Empower girls	Contaminated	Charcoal	Culture	Data banks	Culture	Cities	Consumerism	Climate action	Coastal habitats	Biodiversity	Arms trafficking	Disaggregated data
Environment	Doha Development Round / Doha Round	Antenatal care	Disability and education	Empowerment	Defecation	Clean energy	Decent work	Economic development	Developing countries	Climate change	Consumption	Climate adaptation	Coastal parks	Biodiversity loss	Birth registration	Doha Development Agenda
Equality	End hunger	Antiretroviral	Early childhood	Empowerment of women / empower women / women's empowerment	Desalination	Clean energy technology	Decent work for all	Electrical power	Developing states	Community	Deep decarbonisation	Climate and gender	Coastal resources	Conservation	Bribery	Entrepreneurship
Extreme poverty	Environment	Antiretroviral therapy	Early childhood development	Equal access	Diarrhoeal diseases	Clean fuel technology	Development oriented policy	Energy	Development assistance	Cultural heritage	Ecological	Climate and infectious disease	Coastlines	Deforestation	Combat terrorism	Environmentally sound technologies

SDG 1 (No poverty)	SDG 2 (Zero hunger)	SDG3 (Good health and well-being)	SDG 4 (Quality education)	SDG 5 (Gender equality)	SDG 6 (Clean water and sanitation)	SDG 7 (Affordable and clean energy)	SDG 8 (Decent work and economic growth)	SDG 9 (Industry, innovation and infrastructure)	SDG 10 (Reduced inequalities)	SDG 11 (Sustainable cities and communities)	SDG 12 (Responsible consumption and production)	SDG 13 (Climate action)	SDG 14 (Life below water)	SDG 15 (Life on land)	SDG 16 (Peace, justice and strong institutions)	SDG 17 (Partnerships for the goals)
Financial inclusion	Food	Biomedical	Education	Equal opportunities	Drought	Clean fuels	Economic growth	Enterprises	Disabilities	Decentralisation	Efficient use of resources	Climate and politics	Conserve	Desertification	Conflict resolution	Foreign direct investments
Income	Food gap	Bodily autonomy	Education for sustainability	Equality	Dumping	Cleaner fossil fuel technology	Economic productivity	Environmentally sound technologies	Discrimination	Development planning	Energy	Climate change	Conserve oceans	Drought	Conflicts	Fostering innovation
Income equality	Food production	Child deaths	Education in developing	Exploitation	Ecosystem protection	Climate goal	Economy	Financial services	Discriminatory	Disaster management	Energy consumption	Climate change management	Coral bleaching	Drylands	Corruption	Free trade
Microfinance	Food reserves	Contraceptive use	Enrolment	Female genital mutilation	Ecosystem restoration	Coal	Enterprises	ICT infrastructure	Economy	Disaster risk reduction	Energy efficiency	Climate change planning	Coral reef	Ecosystem	Discrimination	Fundamental principles of official statistics
Non-discrimination	Food Security	Death rate	Equal access	Feminism	Equitable sanitation	Electricity	Entrepreneurship	Industrial diversification	Education	Disaster Strategy	Energy use	Climate change policy	Ecosystem management	Ecosystem restoration	Education	Global partnership
Poor	Genetic diversity	Dental	Equal education	Forced marriage	Floods	Electricity infrastructure	Equal pay	Industrialisation	Empower	Disasters	Food	Climate early warning	Fish species	Ecosystems	Enforced disappearance	Global partnership for sustainable development
Poor and vulnerable	Genetic diversity of seeds	Disability and family support	Equitable education	Gender	Fresh water	Emissions	Finance	Information and communication technology	Equal opportunity	Fine particulate matter	Food losses	Climate hazards	Fish stocks	Extinct	Equal access	Global stability
Poverty	Genetics	Disability and inclusion	Gender disparities in education	Gender discrimination	Hydropower	Energy	Financial services	Infrastructure	Equality	Green spaces	Food supply	Climate impact	Fish stocks AND FISHERIES MANAGEMENT	Extinct species	Equity	International aid
Poverty eradication	Hunger	Disability and politics of location	Gender disparity	Gender equality/parity	Hygiene	Energy efficiency	Forced labour	Innovation	Equity	Heritage	Food waste	Climate mitigation	Fisheries	Extinction	Exploitation	International cooperation

SDG 1 (No poverty)	SDG 2 (Zero hunger)	SDG3 (Good health and well-being)	SDG 4 (Quality education)	SDG 5 (Gender equality)	SDG 6 (Clean water and sanitation)	SDG 7 (Affordable and clean energy)	SDG 8 (Decent work and economic growth)	SDG 9 (Industry, innovation and infrastructure)	SDG 10 (Reduced inequalities)	SDG 11 (Sustainable cities and communities)	SDG 12 (Responsible consumption and production)	SDG 13 (Climate action)	SDG 14 (Life below water)	SDG 15 (Life on land)	SDG 16 (Peace, justice and strong institutions)	SDG 17 (Partnerships for the goals)
Poverty line	Hungry people	Diseases	Gender equality	Governance and gender	Improving water	Energy infrastructure	GDP growth	Internet access	Ethnicity	Housing	Fossil fuel subsidies	Climate refugees	Fishers	Forest	Flow of arms	International population and housing census
Quality of Life	Improved nutrition	Family planning	Gender equity	Human rights	Inadequate water	Energy research	Global resource efficiency	Irrigation	Financial assistance	Human settlements	Future proof	Climate related hazards	Fishing	Forest management	Freedom	International support
Resources	Innovations and health	Health	Gender sensitive	Human trafficking	Inadequate water supply	Energy technology	Global trade	Knowledge in education for all	Foreign aid	Impact of cities	Global food waste	Climate resilience	Fishing practices	Forests	Geography of poverty	International support for developing countries
Social protection systems / social protection	Legumes	Health in resource - constrained settings	Global citizenship	Humanitarian	Infrastructure	Fossil-fuel	Gross domestic product growth	Mobile networks in developing countries	Foreign investment	Inadequate housing	Greenhouse gasses	CO2 capture	Global warming	Genetic resources	Governance	Knowledge sharing
Sustainable	Maize	Health worker density	Global education	Marginalised	Irrigation	Green economy	Human trafficking	National Security	Gender	Informal settlements	Harvest losses	CO2 conversion	Illegal fishing	Illegal wildlife products	Hate crime	Multi-stakeholder partnerships
Third World	Malnourished	Healthy	Inclusion and education	Parity	Lakes	Greenhouse gas	Inclusive economic growth	Network infrastructure	Global financial markets	Infrastructure	Life cycle	COP 21	Kelp	Illicit trafficking	Human rights	Poverty eradication
Vulnerable	Malnutrition	Healthy lives	Inclusive	Pay	Latrines	Greenhouse gas emissions	Innovation	Phone service	Health	Land	Market distortions	COP 22	Law of the Sea	Indigenous	Human trafficking	Public-private partnerships
Wealth distribution	Nutrition	Hepatitis	Innovation	Reproductive rights	Open defecation	Hydroelectric	Insurance	Public policy	Homelessness	Land consumption	Materialism	Ecosystems	Marine	Indigenous populations	Illegal arms	Science cooperation agreements
	Nutritional needs	HIV	International cooperation	Sexual and reproductive health	Pollution	Low carbon	Job creation	Quality of life	Homophobia	Local materials	Materials goods	Emissions	Marine areas	Invasive alien species	Illicit financial flows	Technology cooperation agreements

SDG 1 (No poverty)	SDG 2 (Zero hunger)	SDG 3 (Good health and well-being)	SDG 4 (Quality education)	SDG 5 (Gender equality)	SDG 6 (Clean water and sanitation)	SDG 7 (Affordable and clean energy)	SDG 8 (Decent work and economic growth)	SDG 9 (Industry, innovation and infrastructure)	SDG 10 (Reduced inequalities)	SDG 11 (Sustainable cities and communities)	SDG 12 (Responsible consumption and production)	SDG 13 (Climate action)	SDG 14 (Life below water)	SDG 15 (Life on land)	SDG 16 (Peace, justice and strong institutions)	SDG 17 (Partnerships for the goals)
	Nutritious	Improving mortality	Learning opportunities	Sexual exploitation	Recycled water	Modern electricity	Jobs	Regional infrastructure	Human rights	mitigation	Monitoring sustainable development	Extreme weather	Marine biodiversity	Land conservation	Inclusion	Technology transfer
	Poverty	Increasing life expectancy	Lifelong learning	Sexual violence	Reuse	Modern energy	Labour market	Research	Inclusion	Natural disasters	Natural resources	Extreme weather events	Marine ecosystems	Land degradation	Inclusive institutions	Weighted tariff average
	Produce	Indigenous	Literacy	Social inclusion	River basins	Reliable energy	Labour rights	Resilient infrastructure	Income growth	Natural heritage	Obsolescence	Global mean temperature	Marine fisheries	Land loss	Inclusive societies/society	Women entrepreneurs
	Productivity	Infected	Literacy skills	Trafficking	Rivers	Renewable	Micro finance	Resource use efficiency	Income inequality	Overcrowding	Overconsumption	Global temperature	Marine Parks	Land use and sustainability	Institutions	World Trade Organization
	Quality of life	International health policy	Numeracy	Universal health coverage	Safe drinking water	Renewable energy	Migrant workers	Roads	Indigenous	Pollution	Production	Global warming	Marine pollution	Managed forests	Internally displaced	
	Resilient agriculture	International health regulations	Primary education	Violence	Sanitation	Renewable power	Modern slavery	Sanitation	Inequalities	Population	Recycle	Greenhouse gas	Marine resources	Managed forests	Judiciary	
	Rural infrastructure	Malaria	Primary education	Violence against girls	Sanitation and hygiene	Solar	Poverty eradication	Scientific research	Inequality	Population growth	Recycling	Greenhouse gas emissions	Ocean	Micro-organisms	Justice	
	Small-scale food producers	Maternal mortality	Qualified teachers	Violence against women	Sanitation management	Solar energy	Poverty line	Society	Migrant remittance	Public spaces	Reduce waste generation	Greenhouse gases	Ocean acidification	Permaculture	Justice for all	
	Stunted growth	Measles	Refugees and learning	Women	Sewerage	Solar power	Productive employment	Sustainable industrialisation	Migration	Public transport	Reduction	Ice loss	Ocean temperature	Plants	Legal identity	
	Stunting	Medical	Scholarships	Women in work	Sustainable water management	Sustainable energy	Productivity	Sustainable infrastructure	Population growth	Resilient	Renewable	Low-carbon economy	Oceanography	Poaching	National Security	

SDG 1 (No poverty)	SDG 2 (Zero hunger)	SDG 3 (Good health and well-being)	SDG 4 (Quality education)	SDG 5 (Gender equality)	SDG 6 (Clean water and sanitation)	SDG 7 (Affordable and clean energy)	SDG 8 (Decent work and economic growth)	SDG 9 (Industry, innovation and infrastructure)	SDG 10 (Reduced inequalities)	SDG 11 (Sustainable cities and communities)	SDG 12 (Responsible consumption and production)	SDG 13 (Climate action)	SDG 14 (Life below water)	SDG 15 (Life on land)	SDG 16 (Peace, justice and strong institutions)	SDG 17 (Partnerships for the goals)
	Sufficient food	Mental health	School	Women's rights	Sustainable withdrawals	Sustainable energy services	Public policy	Technological capabilities	Poverty	Resilient buildings	Resource efficiency	Natural disasters	Oceans	Poverty	Non-violence	
	Sustainable	Mortality	School enrolment	Workplace equality	Third world	Sustainable power	Quality jobs	Technology	Public policy	Resource efficiency	Responsible production chains	Natural systems	Overfishing	Protected fauna	Organized crime	
	Sustainable agriculture	Mortality rate	Secondary education		Toilets	Vehicles	Quality of life	Trade	Quality of life	Resource needs	Retail	Ocean warming	Productive oceans	Protected flora	Paris principles	
	Sustainable food production	Narcotic drug abuse	Teacher training		Untreated wastewater	Wave	Resource efficiency	Transborder infrastructure	Race	Risk reduction strategy	Retail industry	Paris Agreement	Protected areas	Protected species	Peace	
	Trade diversity	Neonatal mortality	Universal education		Urban	Wind	Safe work	Transport	Racism	Road safety	Reuse	Pollution	Sea grasses	Reforestation	Peaceful societies	
	Trade restrictions	Polio	Vocational training		Waste	Wind power	Secure work	Value chains	Reduce inequalities	Safe cities	Sustainable	Renewable	Seas	Soil	Physical abuse	
	Undernourished / Undernourished	Premature mortality	Vulnerable		Wastewater	Wind turbine	Slavery	Value chains and markets	Religion	Shanty	Sustainable consumption	Sea level rise / Rising sea / Rising sea level	Sustainable ecosystems	Soil degradation	Police	
	Wasting	Preventable deaths	Women's rights		Wastewater treatment	Wood	Social policies	Water infrastructure	Rural	Slums	Sustainable management	Temperature	Unregulated fishing	Species	Prevent violence	
	World's hungry	Reducing malaria			Water		Society	Water resources	Sex	Smart cities	Sustainable practices	Warming	Water resources and policy	Strategic plan for biodiversity	Psychological abuse	
		Reducing mortality			Water access		Stable employment		Sexism	Solid waste	Sustainable production			Terrestrial ecosystems	Public policy	
		Refugees and health services			Water disasters		Stable jobs		Social protection	Suburban	Sustainable public procurement			Threatened species	Quality of life	

SDG 1 (No poverty)	SDG 2 (Zero hunger)	SDG 3 (Good health and well-being)	SDG 4 (Quality education)	SDG 5 (Gender equality)	SDG 6 (Clean water and sanitation)	SDG 7 (Affordable and clean energy)	SDG 8 (Decent work and economic growth)	SDG 9 (Industry, innovation and infrastructure)	SDG 10 (Reduced inequalities)	SDG 11 (Sustainable cities and communities)	SDG 12 (Responsible consumption and production)	SDG 13 (Climate action)	SDG 14 (Life below water)	SDG 15 (Life on land)	SDG 16 (Peace, justice and strong institutions)	SDG 17 (Partnerships for the goals)
		Reproductive health			Water ecosystems		Sustainable consumption		Society	Sustainable	Sustainable resource use			Tree	Representative decision-making	
		Road traffic accidents			Water efficiency		Sustainable economic growth		Vulnerable nations	Sustainable building/s	Sustainable supply chain			Tree species	Rule of law	
		Sexual and reproductive health-care			Water harvesting		Sustainable production		World trade	Sustainable cities/city	Sustainable tourism			Wetlands	Security threats	
		Sexual health			Water quality		Sustainable tourism			Sustainable communities	Vehicles				Sexual abuse	
		Soil contamination			Water resources management		Trade			Sustainable urbanisation	Waste				Sexual violence	
		Soil pollution			Water scarcity		Unemployment			Town planning	Wasteful consumption				Stolen assets	
		Tobacco control			Water supply		Well-paid jobs			Transport	Water				Tax evasion	
		Treatment of substance abuse			Water-related ecosystems		Women migrants			Transport systems	Water pollution				Theft	
		Tuberculosis			Water-use efficiency		Work			Urban	Water supply				Torture	
		Universal health					Work opportunities			Urban development					Trafficking	
		Universal health coverage					World trade			Urban planning					Transparency	
		Vaccines					Youth employment			Urban sustainability					Un-sentenced detainees	

SDG 1 (No poverty)	SDG 2 (Zero hunger)	SDG 3 (Good health and well-being)	SDG 4 (Quality education)	SDG 5 (Gender equality)	SDG 6 (Clean water and sanitation)	SDG 7 (Affordable and clean energy)	SDG 8 (Decent work and economic growth)	SDG 9 (Industry, innovation and infrastructure)	SDG 10 (Reduced inequalities)	SDG 11 (Sustainable cities and communities)	SDG 12 (Responsible consumption and production)	SDG 13 (Climate action)	SDG 14 (Life below water)	SDG 15 (Life on land)	SDG 16 (Peace, justice and strong institutions)	SDG 17 (Partnerships for the goals)
		Vaccines in developing countries					Youth unemployment			Urbanisation					Unstable societies	
		Violence								Waste					Victims of violence	
		WASH								Waste generation					Violence	
		Water, Sanitation and Hygiene for All								Waste management					Violence against women and children	
		Water-borne disease								Water					Violence rates	
		wellbeing/well being/well-being								Water-related disasters					Weapon seizures	
		World Health Organisation														



DRPM
DIREKTORAT RISET DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

+62 31-5953759; +62 31 5936940

<https://www.its.ac.id/drpm>

Gedung Pusat Riset, Lantai Lobby
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Kampus ITS Sukolilo Surabaya

